



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 271/KU.03.2-SD/01/KPU/III/2020 Jakarta, 23 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan 2020

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
Pelaksana Pemilihan 2020, sebagaimana terlampir.

Di
tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-138/MK.02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Usulan Standar Biaya Honorarium Badan *ad hoc* Pemilihan 2020, terdapat kenaikan besaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilihan *ad hoc* PPK dan PPS, sebagai berikut :

URAIAN	BESARAN BIAYA	
	SEMULA	MENJADI
1. PPK		
a. Ketua	2.200.000	2.500.000
b. Anggota	1.900.000	2.200.000
c. Sekretaris	1.550.000	1.850.000
d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	1.000.000	1.300.000
2. PPS		
a. Ketua	1.200.000	1.500.000
b. Anggota	1.150.000	1.300.000
c. Sekretaris	1.100.000	1.150.000
d. Pelaksana	1.000.000	1.050.000

Pelaksanaan ketentuan dimaksud mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Satuan biaya tersebut merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui;
 - b. Persetujuan besaran satuan biaya dimaksud tidak mengakibatkan penambahan alokasi anggaran (secara *on top*) dan dipenuhi dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang telah tersedia melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Dalam hal Pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Bupati atau Pemilihan Wali Kota dilaksanakan bersamaan, maka tidak diperkenankan duplikasi pemberian honorarium; dan
 - d. Ketentuan berlaku sejak bulan Januari 2020 dan pelaksanaannya memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran dan kepatutan, serta dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
2. Pemenuhan kompensasi PPS dalam melakukan verifikasi faktual adalah berupa pemberian transport selama pelaksanaan sensus dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Apabila pelaksanaan dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, maka dapat ditambah Uang Harian sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada;
 3. Pemenuhan anggaran kegiatan Uji Publik Data Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dipenuhi dari komponen Rapat Kerja sebagaimana terlampir pada Lampiran I, Keputusan KPU Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020;
 4. Berkenaan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2024/SJ tanggal 2 Maret 2020 perihal Penjelasan Tambahan Substansi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/463/SJ tanggal 20 Januari 2020, khususnya terkait pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dapat dijelaskan bahwa :
 - a. Bagi PNSD yang telah mendapatkan atau tidak mendapatkan tambahan penghasilan oleh Pemerintah Daerah dan ditugaskan pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dapat menerima honorarium tim kelompok kerja dan honorarium pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan KPU Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020;
 - b. Bagi PNSD yang telah mendapatkan atau tidak mendapatkan tambahan penghasilan oleh Pemerintah Daerah dan ditugaskan pada Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan, dapat menerima honorarium badan *ad hoc* (PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, PPDP dan KPPS, termasuk petugas Pengamanan TPS);

5. Pemenuhan kompensasi atas Kecelakaan Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan 2020 yang dapat dibiayai hanya berupa santunan dengan besaran setinggi-tingginya sebagaimana tercantum pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-850/MK.02/2019 tanggal 27 November 2019 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Santunan Kerja Penyelenggara *ad hoc* Pemilihan 2020. Adapun terkait Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja yang ditawarkan pihak asuransi, dapat dibiayai secara pribadi oleh masing-masing Badan *ad hoc*;
6. Dalam rangka kebutuhan perjalanan dinas sebagaimana lampiran I Keputusan KPU Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020, angka 16 Perjalanan Dinas, huruf c Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan (di TPS) dalam rangka Validasi Data Pemilih di KPU Provinsi dan dalam rangka Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan (di TPS) dalam rangka Validasi Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota, dapat dijelaskan bahwa kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk Supervisi Monitoring Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan lainnya. Namun demikian, dalam rangka pengendalian dan penghematan perjalanan dinas, maka sisa anggaran Pemilihan tidak diperkenankan melakukan revisi anggaran untuk menambah alokasi perjalanan dinas, kecuali untuk menghadiri undangan dari KPU RI dan kebutuhan mendesak lainnya yang telah dituangkan dalam berita acara Pleno oleh Komisioner KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Revisi anggaran dim aksud juga memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/2024/SJ.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman

Lampiran Surat Ketua KPU RI

Nomor : 271/KU.03.2-SD/01/KPU/III/2020

Tanggal : 23 Maret 2020

No	Nama Satker
1	KPU Provinsi Bengkulu
2	KPU Provinsi Jambi
3	KPU Provinsi Kalimantan Selatan
4	KPU Provinsi Kalimantan Tengah
5	KPU Provinsi Kalimantan Utara
6	KPU Provinsi Kepulauan Riau
7	KPU Provinsi Sulawesi Tengah
8	KPU Provinsi Sulawesi Utara
9	KPU Provinsi Sumatera Barat
10	KPU Kabupaten Sukabumi
11	KPU Kabupaten Cianjur
12	KPU Kabupaten Karawang
13	KPU Kabupaten Bandung
14	KPU Kabupaten Tasikmalaya
15	KPU Kabupaten Indramayu
16	KPU Kota Depok
17	KPU Kabupaten Pangandaran
18	KPU Kabupaten Semarang
19	KPU Kabupaten Kendal
20	KPU Kabupaten Demak
21	KPU Kabupaten Grobogan
22	KPU Kabupaten Pekalongan
23	KPU Kabupaten Pemasang
24	KPU Kabupaten Rembang
25	KPU Kabupaten Blora
26	KPU Kabupaten Purbalingga
27	KPU Kabupaten Wonosobo
28	KPU Kabupaten Purworejo
29	KPU Kabupaten Kebumen
30	KPU Kabupaten Klaten
31	KPU Kabupaten Boyolali
32	KPU Kabupaten Sragen
33	KPU Kabupaten Sukoharjo
34	KPU Kabupaten Wonogiri
35	KPU Kota Semarang
36	KPU Kota Pekalongan
37	KPU Kota Magelang
38	KPU Kota Surakarta
39	KPU Kabupaten Bantul
40	KPU Kabupaten Gunungkidul
41	KPU Kabupaten Sleman
42	KPU Kabupaten Banyuwangi
43	KPU Kabupaten Blitar
44	KPU Kabupaten Gresik

No	Nama Satker
45	KPU Kabupaten Jember
46	KPU Kabupaten Kediri
47	KPU Kabupaten Lamongan
48	KPU Kabupaten Malang
49	KPU Kabupaten Mojokerto
50	KPU Kabupaten Ngawi
51	KPU Kabupaten Pacitan
52	KPU Kabupaten Ponorogo
53	KPU Kabupaten Sidoarjo
54	KPU Kabupaten Situbondo
55	KPU Kabupaten Sumenep
56	KPU Kabupaten Trenggalek
57	KPU Kabupaten Tuban
58	KPU Kota Surabaya
59	KPU Kota Blitar
60	KPU Kota Pasuruan
61	KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
62	KPU Kabupaten Nias
63	KPU Kabupaten Tanah Karo
64	KPU Kabupaten Serdang Bedagai
65	KPU Kabupaten Simalungun
66	KPU Kabupaten Asahan
67	KPU Kabupaten Labuhan Batu
68	KPU Kabupaten Toba Samosir
69	KPU Kabupaten Samosir
70	KPU Kabupaten Mandailing Natal
71	KPU Kabupaten Nias Selatan
72	KPU Kabupaten Pakpak Barat
73	KPU Kab. Humbang Hasundutan
74	KPU Kota Medan
75	KPU Kota Pematang Siantar
76	KPU Kota Sibolga
77	KPU Kota Tanjung Balai
78	KPU Kota Binjai
79	KPU Kab. Labuhan Batu Selatan
80	KPU Kab. Labuhan Batu Utara
81	KPU Kabupaten Nias Utara
82	KPU Kabupaten Nias Barat
83	KPU Kota Gunung Sitoli
84	KPU Kabupaten Pesisir Selatan
85	KPU Kabupaten Solok
86	KPU Kabupaten Solok Selatan
87	KPU Kabupaten Sijunjung
88	KPU Kabupaten Dharmas Raya

No	Nama Satker
89	KPU Kabupaten Tanah Datar
90	KPU Kabupaten Padang Pariaman
91	KPU Kabupaten Agam
92	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
93	KPU Kabupaten Pasaman
94	KPU Kabupaten Pasaman Barat
95	KPU Kota Solok
96	KPU Kota Bukittinggi
97	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
98	KPU Kabupaten Indragiri Hulu
99	KPU Kabupaten Pelalawan
100	KPU Kabupaten Siak
101	KPU Kabupaten Rokan Hulu
102	KPU Kabupaten Bengkalis
103	KPU Kabupaten Rokan Hilir
104	KPU Kota Dumai
105	KPU Kab. Kepulauan Meranti
106	KPU Kabupaten Batanghari
107	KPU Kab. Tanjung Jabung Timur
108	KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
109	KPU Kabupaten Bungo
110	KPU Kota Sungai Penuh
111	KPU Kabupaten Musi Rawas
112	KPU Kabupaten Ogan Ilir
113	KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu
114	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Timur
115	KPU Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
116	KPU Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
117	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
118	KPU Kabupaten Lampung Tengah
119	KPU Kabupaten Lampung Timur
120	KPU Kabupaten Way Kanan
121	KPU Kabupaten Lampung Selatan
122	KPU Kota Metro
123	KPU Kota Bandar Lampung
124	KPU Kab. Pesawaran
125	KPU Kabupaten Pesisir Barat
126	KPU Kabupaten Sambas
127	KPU Kabupaten Bengkayang
128	KPU Kabupaten Sekadau
129	KPU Kabupaten Ketapang
130	KPU Kabupaten Sintang
131	KPU Kabupaten Melawi
132	KPU Kabupaten Kapuas Hulu
133	KPU Kabupaten Kotawaringin Timur
134	KPU Kabupaten Balangan
135	KPU Kabupaten Tanah Bumbu
136	KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Nama Satker
137	KPU Kabupaten Banjar
138	KPU Kabupaten Kotabaru
139	KPU Kota Banjar Baru
140	KPU Kota Banjarmasin
141	KPU Kabupaten Kutai Timur
142	KPU Kabupaten Kutai Barat
143	KPU Kabupaten Berau
144	KPU Kabupaten Kutai Kertanegara
145	KPU Kabupaten Paser
146	KPU Kota Bontang
147	KPU Kota Samarinda
148	KPU Kota Balikpapan
149	KPU Kabupaten Mahakam Ulu
150	KPU Kabupaten Minahasa Selatan
151	KPU Kabupaten Minahasa Utara
152	KPU Kota Manado
153	KPU Kota Bitung
154	KPU Kota Tomohon
155	KPU Kab. Bolaang Mon.Selatan
156	KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur
157	KPU Kabupaten Banggai
158	KPU Kabupaten Poso
159	KPU Kabupaten Toli-Toli
160	KPU Kabupaten Tojo Una-Una
161	KPU Kota Palu
162	KPU Kabupaten Sigi
163	KPU Kabupaten Banggai Laut
164	KPU Kabupaten Morowali Utara
165	KPU Kabupaten Selayar
166	KPU Kabupaten Bulukumba
167	KPU Kabupaten Gowa
168	KPU Kabupaten Maros
169	KPU Kab. Pangkajene Kepulauan
170	KPU Kabupaten Barru
171	KPU Kabupaten Soppeng
172	KPU Kabupaten Tanatoraja
173	KPU Kabupaten Luwu Utara
174	KPU Kabupaten Luwu Timur
175	KPU Kota Makassar
176	KPU Kab. Toraja Utara
177	KPU Kabupaten Kolaka Timur
178	KPU Kabupaten Muna
179	KPU Kabupaten Konawe Selatan
180	KPU Kabupaten Wakatobi
181	KPU Kab. Konawe Utara
182	KPU Kab. Buton Utara
183	KPU Kabupaten Konawe Kepulauan
184	KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Nama Satker
185	KPU Kabupaten Kepulauan Aru
186	KPU Kab. Buru Selatan
187	KPU Kab. Maluku Barat Daya
188	KPU Kabupaten Jemberana
189	KPU Kabupaten Karangasem
190	KPU Kabupaten Bangli
191	KPU Kabupaten Badung
192	KPU Kabupaten Tabanan
193	KPU Kota Denpasar
194	KPU Kabupaten Lombok Tengah
195	KPU Kabupaten Bima
196	KPU Kabupaten Sumbawa
197	KPU Kabupaten Dompu
198	KPU Kabupaten Sumbawa Barat
199	KPU Kota Mataram
200	KPU Kabupaten Lombok Utara
201	KPU Kabupaten Belu
202	KPU Kabupaten Timor Tengah Utara
203	KPU Kabupaten Ngada
204	KPU Kabupaten Manggarai
205	KPU Kabupaten Sumba Timur
206	KPU Kabupaten Sumba Barat
207	KPU Kabupaten Manggarai Barat
208	KPU Kabupaten Sabu Raijua
209	KPU Kabupaten Malaka
210	KPU Kabupaten Merauke
211	KPU Kabupaten Nabire
212	KPU Kabupaten Kerom
213	KPU Kabupaten Pegunungan Bintang
214	KPU Kabupaten Yahukimo
215	KPU Kabupaten Waropen
216	KPU Kabupaten Boven Digul
217	KPU Kabupaten Asmat
218	KPU Kabupaten Supiori
219	KPU Kabupaten Mamberamo
220	KPU Kabupaten Yalimo
221	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
222	KPU Kabupaten Kapahiyang
223	KPU Kabupaten Rejang Lebong
224	KPU Kabupaten Lebong
225	KPU Kabupaten Bengkulu Utara
226	KPU Kabupaten Kaur
227	KPU Kabupaten Seluma
228	KPU Kabupaten Muko-Muko
229	KPU Kabupaten Halmahera Barat
230	KPU Kabupaten Halmahera Utara
231	KPU Kabupaten Halmahera Selatan
232	KPU Kabupaten Halmahera Timur

No	Nama Satker
233	KPU Kabupaten Kepulauan Sula
234	KPU Kota Ternate
235	KPU Kota Tidore Kepulauan
236	KPU Kabupaten Pulau Taliabu
237	KPU Kabupaten Serang
238	KPU Kabupaten Pandeglang
239	KPU Kota Cilegon
240	KPU Kota Tangerang Selatan
241	KPU Kabupaten Belitung Timur
242	KPU Kabupaten Bangka Barat
243	KPU Kabupaten Bangka Tengah
244	KPU Kabupaten Bangka Selatan
245	KPU Kabupaten Gorontalo
246	KPU Kabupaten Bone Bolango
247	KPU Kabupaten Pohuwato
248	KPU Kabupaten Bintan
249	KPU Kabupaten Lingga
250	KPU Kabupaten Karimun
251	KPU Kabupaten Natuna
252	KPU Kota Batam
253	KPU Kabupaten Kep. Anambas
254	KPU Kabupaten Fak-Fak
255	KPU Kabupaten Manokwari
256	KPU Kabupaten Sorong Selatan
257	KPU Kabupaten Raja Ampat
258	KPU Kabupaten Kaimana
259	KPU Kabupaten Teluk Bintuni
260	KPU Kabupaten Teluk Wondama
261	KPU Kabupaten Pegunungan Arfak
262	KPU Kabupaten Manokwari Selatan
263	KPU Kabupaten Majene
264	KPU Kabupaten Mamuju
265	KPU Kabupaten Mamuju Utara
266	KPU Kabupaten Mamuju Tengah
267	KPU Kabupaten Malinau
268	KPU Kabupaten Nunukan
269	KPU Kabupaten Bulungan
270	KPU Kab. Tana Tidung